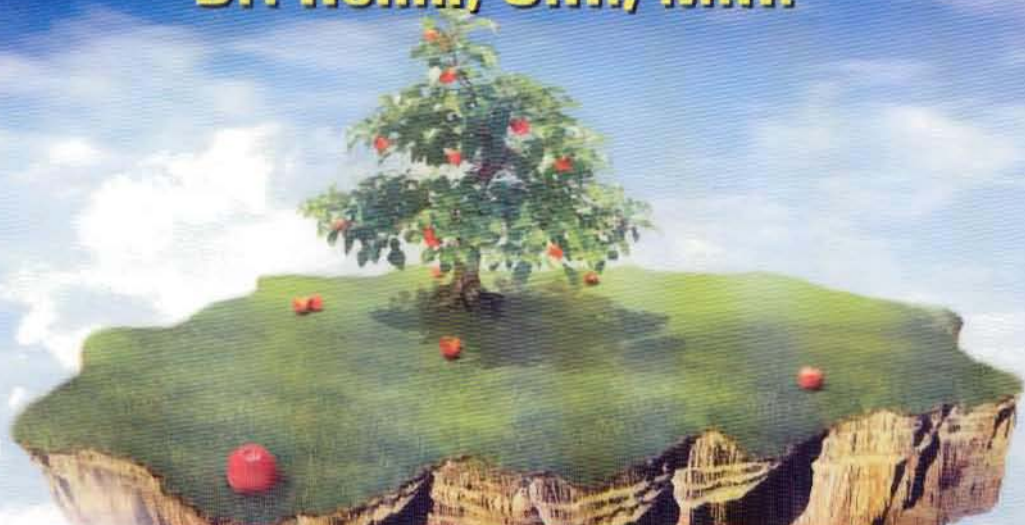
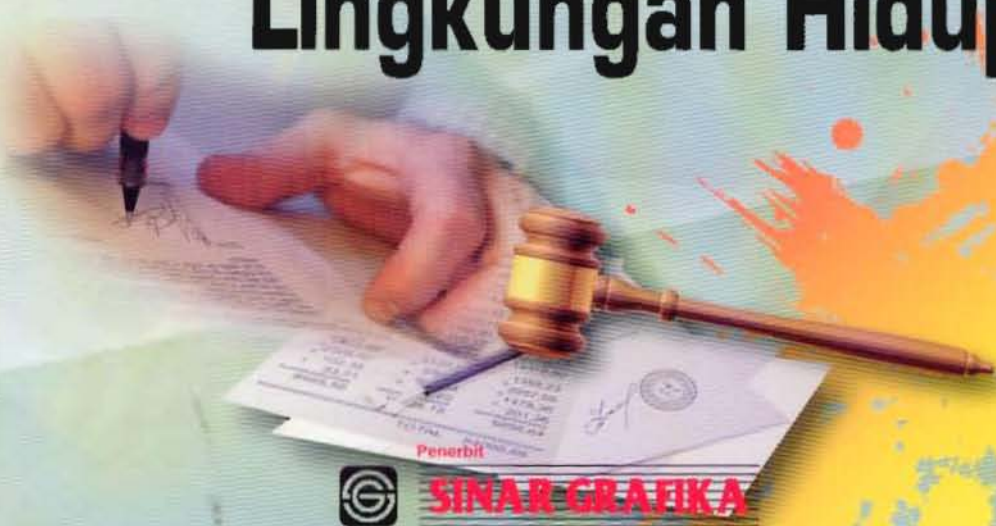


Dr. Helmi, S.H., M.H.




HUKUM

Perizinan Lingkungan Hidup



Penerbit

SINAR GRAFIKA



Sistem hukum perizinan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), terdiri dari izin lingkungan dan izin usaha atau kegiatan, kedua jenis izin itu disebut izin lingkungan hidup. Dalam UU-PPLH, sistem hukum perizinan harus diselenggarakan secara terpadu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Namun, lebih dari 2 (dua) tahun berlakunya UU-PPLH ternyata penyelenggaraan izin lingkungan hidup belum terpadu. Peraturan pelaksana terutama peraturan pemerintah tentang Perizinan belum ada, bahkan terdapat kecenderungan, UU-PPLH akan bernasib sama dengan kedua UU sebelumnya, yang menjadi sasaran empuk pelanggaran hukum.

Buku ini mengkaji sistem hukum perizinan secara kritis terutama beranjak dari pemikiran bahwa lingkungan hidup merupakan konsep utuh, tidak dapat dilakukan pengaturan dengan pendekatan sektoral. Bahkan, para penulis hukum lingkungan yang ada saat ini kurang menyadari makna dan hakikat konsep lingkungan hidup, sehingga terjebak dengan dikotomi sektoral misalnya dengan memakai istilah sumber daya alam.

Oleh karena itu, buku ini sangat menarik untuk dibaca dan dijadikan rujukan bagi mahasiswa, aparat pemerintah, kalangan pengusaha dan praktisi; pembaca memperoleh pemahaman tentang makna, ruang lingkup, dan bangunan sistem hukum perizinan lingkungan hidup.

ISBN 979-007-453-0



9 789790 074538

Hkm Perizinan Lingkungan Hidup



Daftar Isi

PRAKATA	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Isu Hukum tentang Perizinan Lingkungan	1
B. Indonesia sebagai Negara Hukum Kesejahteraan	15
C. Hukum Administrasi sebagai Konsekuensi Negara Hukum Kesejahteraan	18
D. Hukum Lingkungan sebagai Sarana Pembangunan ...	19
E. Sistem Perizinan Lingkungan Hidup	26
F. Pembangunan Berkelanjutan	29
BAB 2 NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DAN HUKUM LING- KUNGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKE- LANJUTAN	34
A. Negara Hukum Kesejahteraan	34
B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rangka Perizinan Lingkungan Hidup	44
C. Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Perlin- dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	56

BAB 3	HAKIKAT PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU-PPLH	77
A.	Makna Sistem Perizinan	77
B.	Fungsi dan Tujuan Sistem Perizinan Lingkungan Hidup	81
C.	Perizinan dan Kaitannya dengan Tata Ruang	87
D.	Ruang Lingkup Perizinan Lingkungan Hidup	88
E.	Konsep Lingkungan Hidup dalam Sistem Perizinan Lingkungan Hidup di Indonesia	91
F.	Fungsi UU-PPLH sebagai Pedoman Sistem Perizinan Lingkungan Hidup	101
G.	Instrumen Sistem Perizinan Lingkungan Hidup	107
 BAB 4	 SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA	 142
A.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup	142
B.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	150
C.	UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH)	157
D.	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	163
E.	Sistem Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dalam UU Sektoral	168
 BAB 5	 PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN USAHA ATAU KEGIATAN DI INDONESIA	 194
A.	Pelaksanaan Izin Lingkungan	194
B.	Pelaksanaan Izin Usaha atau Kegiatan	200

BAB 6	PENERAPAN SISTEM PERIZINAN TERPADU BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	221
A.	Penerapan Prinsip Keterpaduan	221
B.	Penerapan pada Bidang Kehutanan	231
C.	Penerapan pada Bidang Perkebunan	231
D.	Penerapan pada Bidang Pertambangan	234
BAB 7	UPAYA MEWUJUDKAN KETERPADUAN PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	236
A.	Instrumen Pencegahan dalam UU Sektoral	236
B.	Penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	247
BAB 8	MEMBANGUN SISTEM PERIZINAN TERPADU BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	260
A.	Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Sistem Perizinan Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia	260
B.	Integrasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Perizinan	268
C.	Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup untuk Menjamin Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	283
D.	UU-PPLH sebagai “Payung” Sistem Perizinan	285
E.	Konstruksi Sistem Perizinan dalam UU-PPLH	289
F.	Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup (PTLH)	292
BAB 9	PENUTUP	295
	DAFTAR PUSTAKA	297
	PROFIL PENULIS	307